

**PENGARUH PENDAMPINGAN SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
KEBERHASILAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)  
DI DESA TAPUS KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG**

Oleh :

**Irmayanti**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

[irmayanti2014@yahoo.com](mailto:irmayanti2014@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pengaruh Pendampingan Sosial dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional asosiatif, dan studi pustaka untuk mempertajam pemecahan masalah. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai  $r$  sebesar 0,504 hal ini menunjukkan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial mempunyai hubungan yang positif. Sedangkan koefisien determinasi (KD) ternyata dapat mempengaruhi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial sebesar 25,40%. Sisanya sebesar 74,60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program diperoleh nilai  $r$  sebesar 0,407, hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap Pelaksanaan Program. Koefisien determinasi (KD) Partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan program sebesar 16:56%. Sisanya sebesar 83,44% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan nilai  $R^2$  (R Square) sebesar 0,280 dengan nilai Fhitung 12.030 sedangkan  $F$  tabel dengan taraf signifikansi 5% diperoleh derajat pembilang  $k = 2$  dan  $df = nk-1 = 65-2-1 = 62$ , diperoleh nilai  $F$  tabel sebesar 3.145. Hasil Fhitung (12.030) >  $F$  tabel (3.145), dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dengan demikian variabel  $X_1$  (Bantuan Sosial) dan Variabel  $X_2$  Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel  $Y$  (Pelaksanaan Program).

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pendampingan Sosial

**PENDAHULUAN**

Program pemerintah yang cukup populer yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial adalah program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Program ini didasari kepada banyaknya warga masyarakat miskin yang belum memiliki rumah yang

layak huni. Padahal, salah satu indikator cara membarantas kemiskinan adalah rumah menjadi layak huni. Melalui program ini, kementerian Sosial, ingin melakukan akselerasi pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Pelaksanaan Program RS-RTLH yang dibiayai oleh pemerintah tersebut

tentunya tidak akan berbejalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di daerah. Dengan demikian, akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program daerah tersebut. Akan tetapi, kondisi yang ideal ini belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan alur perencanaan pembangunan daerah. Fenomena ini dapat dilihat ketika program RS-RTLH ini digulirkan di desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, masyarakat cenderung kurang berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Dari pengamatan di lapangan, masyarakat menerima informasi dari pemerintah desa yang simpang siur, penentuan jumlah penerima yang tidak transparan, serta waktu pelaksanaan yang tidak pasti membuat sebagian masyarakat kurang dalam memberikan partisipasinya. Selain itu, ada beberapa indikasi kegagalan dalam program ini. Dari pemaparan di atas kemudian penulis mengangkat judul "Peran Pendamping Sosial Terhadap Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Cadasari Pandeglang."

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendampingan sosial terhadap keberhasilan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang?
2. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang?
3. Seberapa besar pengaruh pendampingan sosial dan partisipasi masyarakat secara bersama sama terhadap keberhasilan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang?

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai: *"a purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern."*

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (1969:79) yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik yang mengatakan bahwa kebijakan adalah:

*"serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau*

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Bahkan yang lebih spesifik juga pernah diungkapkan oleh James Anderson (1984:3) dalam bukunya *public policy making* dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-dasar Kebijakan Publik* memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak yang berwenang secara hukum, anggaran dan politik yang ditujukan untuk memecahkan persoalan yang timbul di masyarakat.

Adapun implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan Kebijakan Menurut Miftah Toha (2011:106) Dalam Bukunya *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* Sebagai berikut :

“kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari

segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.”

Banyak ahli yang mengungkapkan konsep dari implementasi kebijakan. Salah satu diantaranya adalah James P. Lester dan Josep Stewart sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.” Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabaticr (1986:4) yang dikutip dari tulisan ([tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik.html](http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik.html) / 13/05/2013 / Jam 21:15) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Menurut Edward III (1980:1) Sebagaimana dikutip oleh Pandji Santosa

dalam bukunya Administrasi Publik bahwa:

Implementasi Kebijakan adalah: *"Is the stage of policy making between the establishment of a policy"*

Dengan demikian apabila kita simpulkan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahli di atas penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah seluruh kegiatan yang mencakup administratif maupun pelaksanaan yang membawa dampak kepada persoalan yang telah dirumuskan dalam pedoman kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah.

Sedangkan Pendampingan sosial sangat menentukan program penanggulangan kemiskinan mengacu kepada Iffe (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan

informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi "manager perubahan" yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti: melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Setelah melihat dan menelaah uraian praktisi dan ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendampingan sosial adalah upaya untuk membantu masyarakat dalam menemukan potensinya sendiri yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, sampai masyarakat dapat menjalani kehidupannya sendiri.

Melihat uraian diatas, maka dalam penelitian ini ada pendapat sementara yang akan dikaji lebih lanjut kebenarannya, Hipotesis dari penelitian ini adalah:

Diduga bahwa pendampingan sosial berpengaruh terhadap keberhasilan Program RS-RTLH Kementerian Sosial RI di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Diduga bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan Program RS-RTLH Kementerian Sosial RI di Desa Tapos Kecamatan Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Diduga bahwa pendampingan sosial dan Partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap keberhasilan Program RS-RTLH Kementerian Sosial RI di Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi tidak langsung yaitu menggunakan angket. Angket merupakan seperangkat daftar pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden yang menjadi anggota sample penelitian (Arikunto, 2002). Jenis angket yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu responden diberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang menggambarkan hal-hal yang ingin diungkapkan dari variabel-variabel yang ada disertai alternatif jawaban. Dengan menggunakan angket ini diharapkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti bersifat kuantitatif dan pengumpulan data akan lebih efisien ditinjau dari segi biaya, tenaga, dan memudahkan untuk mengolahnya.

Selain itu, responden akan lebih leluasa dalam memberikan jawaban dan waktu yang diperlukan relatif lebih singkat dalam menghimpun data.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan Sosial ( $X_1$ ) : Dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tidak terlepas dari pendampingan kepada penerima Program yang dilakukan dengan lima dimensi yang mencakup: (1) Pasilitator, (2) Pendidik, (3) Perwakilan Masyarakat, (4) Peran-peran teknis
- 2) Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) : dengan menggunakan konsep delapan tangga Arnstein yang memberikan taksonomi secara jelas tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam kehidupan nyata .
- 3) Keberhasilan Program ( $Y$ ) : Indikator Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni : (1) Akuntabilitas, (2) Keadilan, (3) Keberlanjutan, (4) Kemanfaatan, (5) Kemitraan, (6) Kesetiakawanan, (7) Keterbukaan, (8) keterpaduan, (9) Partisipasi, (10) Profesionalitas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak didapat secara langsung akan tetapi didapatkan dari lembaga tempat penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Stratified Random Sampling* atau pengambilan sampel secara acak

stratifikasi, agar perimbangan sampel dari masing-masing strata memadai maka dilakukan perimbangan antara jumlah anggota populasi berdasarkan masing-masing strata (*Proportional Stratified Sampling*).

## PEMBAHASAN

Desa tapos merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Cadasari, yang mempunyai wilayah seluas 367 Ha. Secara administratif terdiri dari 10 kampung 4 Rukun Warga dan 15 Rukun Tetangga. Berbatasan dengan beberapa Desa diantaranya, di bagian Barat dengan Desa Pasir Petey, bagian Utara Desa Koranji, bagian Timur Desa Sukacai, bagian Selatan Desa Kurung Dahu. Penduduk Desa Tapos sampai dengan 2016 berjumlah 5.200 jiwa, yang terdiri dari 2.499 laki-laki dan 2.701 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga seluruhnya adalah 1300 KK.

Sebagai suatu desa, maka Desa Tapos sebagaimana dimaksudkan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa. Menurut peraturan tersebut pada BAB I Pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Dengan demikian Kepala Desa adalah aparatur otonomi daerah (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah) di daerahnya yang menjadi penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desanya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kelurahan atau desa hanya terdapat dalam suatu wilayah kecamatan yang menjadi bagian dari suatu wilayah Kecamatan, sebagai bagian dari Kabupaten atau kotamadya. Dengan demikian pemerintah desa disamping sebagai penyelenggara teknis kebijaksanaan pemerintahan tingkat atasnya, juga berhak untuk merumuskan kebijaksanaan baru yang sejenisnya.

Disamping itu, untuk dapat menjangkau masyarakat dalam pelayanan yang lebih luas Kepala Desa Tapos juga dibantu oleh 6 Rukun Warga dan 18 Rukun Tetangga dan 640 Kepala Keluarga. Sebagai Desa yang berada diantara desa-desa lain yang ada di Kabupaten Pandeglang, wilayahnya sebagian besar dijadikan lahan pertanian dan perkebunan disamping dipergunakan juga untuk tempat tinggal, sekolah, perumahan ibadah dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka hasil dari sumber daya alam dan pertanian merupakan komoditi utama yang dapat diharapkan, sedangkan hasil-hasil dari sektor perburuhan yang lain tidak dapat diharapkan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan (kuesioner) kepada sampel yang telah ditentukan sebanyak 65 eksemplar. Dalam daftar pertanyaan

ini memuat pernyataan-pernyataan yang mengacu pada ketiga variabel penelitian, yaitu variabel Pendampingan Sosial ( $X_1$ ), Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) dan Keberhasilan Program (Y).

Agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan, maka daftar pertanyaan tersebut dirancang agar memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a) Pertanyaan disusun berdasarkan pada acuan teoritis, disesuaikan dengan dimensi dan indikator-indikator variabel sebagaimana yang diuraikan dalam definisi operasional variabel di Bab III terdahulu, dengan maksud untuk memberikan kejelasan kepada responden dalam memberikan jawaban secara objektif dan akurat;
- b) Setiap butir pernyataan yang diajukan mempunyai skala jawaban 1, 2, 3, dan 4. Untuk setiap pernyataan skor tertinggi adalah 4 dan skor terendah adalah 1;
- c) Setiap item pernyataan responden, kemudian dipindahkan ke dalam format skor jawaban yang memuat item pernyataan dan skor jawaban responden, kemudian dilakukan penjumlahan skor untuk masing-masing variabel;
- d) Untuk memudahkan perhitungan lebih lanjut, maka jumlah skor nilai untuk masing-masing variabel dari seluruh angket yang masuk, disusun ke dalam format rekapitulasi skor jawaban.

Berikut adalah hasil data yang diperoleh dari responden melalui

sebaran kuesioner mengenai variabel  $X_1$  Pendampingan Sosial, dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 12 butir.

Dapat dilihat total rata-rata angka penafsiran jawaban responden mengenai Pendampingan Sosial adalah sebesar 32.75. sehingga nilai rata-rata penafsiran sebesar 2.97. Berdasarkan angka tersebut, menunjukkan pelaksanaan Pendampingan Sosial bisa dikatakan Baik, karena berada dalam rentang skala 2,51 - 3,75.

Dapat dilihat total rata-rata angka penafsiran jawaban responden mengenai Partisipasi Masyarakat adalah sebesar 29.51, sehingga nilai rata-rata penafsiran sebesar 2.682. Berdasarkan angka tersebut, menunjukkan Partisipasi Masyarakat bisa dikatakan Baik, karena berada dalam rentang skala 2,51 - 3,75.

Dapat dilihat total rata-rata angka penafsiran jawaban responden mengenai Implementasi Program adalah sebesar 29.71, sehingga nilai rata-rata penafsiran sebesar 2.971. Berdasarkan angka tersebut, menunjukkan Implementasi Program bisa dikatakan Baik, karena berada dalam rentang skala 2,51 - 3,75.

Berdasarkan uji normalitas data, dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk masing-masing variabel bernilai  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga keputusannya adalah bahwa data untuk ketiga variabel Pendampingan Sosial ( $X_1$ ), Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) dan Implementasi Program (Y) seluruhnya berdistribusi normal.

Dari Uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai koefisien  $r^2$  yang

diperoleh seluruhnya bernilai lebih kecil dari pada nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel penelitian tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Dari uji Heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung adalah -1.624 dan -0.995. Sedangkan nilai  $t$  tabel dengan  $df = n-2$  atau  $65-2 = 63$  pada pengujian 2 sisi (signifikansi 0,025), di dapat nilai  $t$  tabel sebesar 2.042. Karena nilai  $t$  hitung (-1.624) berada pada  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima artinya pengujian antara  $\ln e_i^2$  dengan  $\ln X_1$  dan  $\ln e_i^2$  dengan  $\ln X_2$  tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Dari uji autokorelasi dengan Uji  $d$  hitung Durbin Watson dapat nilai  $DW$  yang dihasilkan dari model regresi adalah 1.049. Sedangkan dari tabel  $DW$  dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data ( $n$ ) = 65, serta  $k = 2$  ( $k$  adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1.56699 dan  $dU$  sebesar 1.62936. Berdasarkan data tersebut, maka nilai  $d_{hitung} = 4-dU = (4 - 1.62936) = 2.37064$ . Ternyata nilai  $DW < dL < dU$ . Sehingga sesuai dengan ketentuan yang ada, dapat dikatakan maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

Dari hasil analisis korelasi sederhana ( $r$ ) di atas didapat dijelaskan sebagai berikut:

a. korelasi ( $r$ ) antara Pendampingan Sosial dengan Implementasi Program adalah 0.504 dengan arah

hubungan yang positif, berarti semakin tinggi Pendampingan Sosial maka semakin tinggi pula Implementasi Program. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi antara  $x_1$  dan  $x_2$  dapat digunakan rumus berikut :

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100\% \\ &= (0.504)^2 \times 100\% \\ &= 0.2540 \times 100\% \\ &= 25.40\% \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai  $KD$  di atas, berarti Pendampingan Sosial (Variabel  $X_1$ ) dapat mempengaruhi Implementasi Program (Variabel  $Y$ ) sebesar 25.40%. Sedangkan sisanya 74.60% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

b. Korelasi ( $r$ ) antara Partisipasi Masyarakat dengan Implementasi Program adalah 0.407. dengan arah hubungan yang positif, berarti semakin tinggi Partisipasi Masyarakat maka semakin tinggi Implementasi Program. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi antara  $x_1$  dan  $x_2$  dapat digunakan rumus berikut :

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100\% \\ &= (0.407)^2 \times 100\% \\ &= 0.1656 \times 100\% \\ &= 16.56\% \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai  $KD$  di atas, berarti Partisipasi Masyarakat (Variabel  $X_2$ ) dapat mempengaruhi Implementasi Program (Variabel  $Y$ ) sebesar 16.564%. Sedangkan sisanya 83.44% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Dari Persamaan Regresi Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien Konstanta (a) sebesar 9.886 ; artinya jika Pendampingan Sosial dan Partisipasi Masyarakat nilainya adalah 0, maka harga variabel Implementasi Program, nilainya adalah 9.886.
- 2) Nilai Koefisien regresi variabel Pendampingan Sosial sebesar 1.139; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pendampingan Sosial (X1) mengalami kenaikan 1%, maka harga variabel Implementasi Program (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 11.30%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan yang positif antara X1 dan Y
- 3) Nilai Koefisien regresi variabel Partisipasi Masyarakat sebesar -.593; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Partisipasi Masyarakat (X2) mengalami penurunan 1%, maka harga variabel Implementasi Program (Y) akan mengalami penurunan sebesar 5.93%. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan yang negatif antara X2 dan Y.

Terakhir analisisnya digunakan Uji t untuk membuktikan apakah variabel Pendampingan Sosial dan Partisipasi Masyarakat secara parsial/individu mempunyai pengaruh terhadap kualitas Implementasi Program.

- a. Pengujian koefisien regresi variabel x1 Pendampingan Sosial

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 3.131 sementara nilai t tabel dengan

df 5% dan dk  $n-k-1 = 65-2-1 = 62$  sebesar 1.9989. Hasil perhitungan menunjukkan nilai thitung  $3.131 > t$  tabel, maka  $H_a$  atau  $H_o$  diterima. Yang artinya bahwa secara parsial X1 (Pengawasan) berpengaruh terhadap Y (Implementasi Program).

- b. Pengujian koefisien regresi variabel X2 Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung  $-1.491$  sementara nilai t tabel dengan df 5% dan dk  $n-k-1 = 65-2-1 = 62$  sebesar 3.145. Hasil perhitungan menunjukkan nilai thitung  $-1.491 < t$  tabel, maka  $H_a$  atau  $H_o$  ditolak. Yang artinya bahwa secara parsial X2 (Partisipasi Masyarakat) tidak berpengaruh terhadap Y (Implementasi Program).

Berdasarkan hasil uji F dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Diperoleh F hitung sebesar 12.030
- b. Sementara itu nilai  $f_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh derajat pembilang  $k = 2$  dan  $df = n-k-1 = 65-2-1 = 62$ , maka diperoleh nilai  $f_{tabel}$  sebesar 3.145. Hasil  $F_{hitung} (12.030) > F_{tabel} (3.145)$ , dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

Maka dengan demikian bahwa variabel X1 (Pendampingan Sosial) dan Variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y (Implementasi Program).

## SIMPULAN

Berdasarkan perhitungan dan analisis terhadap variabel yang digunakan dalam

penelitian ini, yakni Pendampingan Sosial (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) serta Implementasi Program (Y) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendampingan Sosial terhadap Implementasi Program  
 Dari hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS versi 17, didapat nilai  $r$  sebesar 0,504, hal ini menunjukkan bahwa Pendampingan Sosial terhadap Implementasi Program memiliki hubungan yang positif. Sementara berdasarkan nilai dari koefisien determinasi (KD) ternyata pendampingan sosial dapat mempengaruhi implementasi program sebesar 25.40% sedangkan sisanya sebesar 74.60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil Hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pendampingan Sosial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Implementasi Program.
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Program  
 Dari hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS versi 17, didapat nilai  $r$  sebesar 0,407, hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Program memiliki hubungan yang kuat dan positif. Sementara berdasarkan nilai dari koefisien determinasi (KD) ternyata Partisipasi Masyarakat dapat mempengaruhi Implementasi Program sebesar 16.56%. Sedangkan sisanya sebesar 83.44% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti sehingga jelas  $H_0$

diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat mempengaruhi Implementasi Program.

3. Pengaruh Pendampingan Sosial dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama terhadap Implementasi Program.

Dari hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan program SPSS versi 17 diperoleh nilai  $R^2$  (R Square) sebesar 0.280 dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12.030 sedangkan  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh derajat pembilang  $k = 2$  dan  $df = n - k - 1 = 65 - 2 - 1 = 62$ , maka diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.145. Hasil  $F_{hitung}$  (12.030) >  $F_{tabel}$  (3.145), dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Maka dengan demikian bahwa variabel X1 (Pendampingan Sosial) dan Variabel X2 Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y (Implementasi Program).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agutino, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, dalam Sumarto ST Hetifah. 2004. Inovasi, Partisipasi, dan Good

- Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Atmoko Tjipto, 2011, Partisipasi Publik dan Birokrasitisme Pembangunan, Jurnal Akuntansi. Hal. 1-18.
- Atmoko, Tjipto. 2009. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi. Hal. 1-18.
- Azwar, Saifuddin.2009. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Cahyono, Kurniawan Dedy. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan. Bogor: Insititut Pertanian Bogor.
- Djohani, Rianningsih, 2007, Modul Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat, Jakarta : Bappenas-UNDP
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 2001. Metodologi Research. Yogyakarta : ANDI.
- Karianga, Hendra. 2011. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Persepektif Hukum dan Demokrasi). Bandung: PT Alumni.
- Martono, Nanang. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2007), Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rhineka Cipta
- Priyatno, Duwi, 2013, Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 17, Yogyakarta: Andi
- Riduwan. 2010. Dasar-dasar Statistika. Bandung: Alfabeta
- Santosa, Pandji, 2008, Administrasi Publik dan Aplikasi Good Governance, Bandung : Refika Aditama
- Santoso, Panji, 2008, Administrasi Publik, Jakarta: Gramedia
- Slamet. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta:Sebelas Maret University Press
- Soetomo, 2006, Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetomo, 2011, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi, 2008, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial, Edisi Revisi, Bandung:Alfabeta
- Sumarto, Hetifah Sj.2009.Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia
- Thoha, Miftah.2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana